



RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA

A. Informasi Umum

Tanggal Rapat : Jumat, 24 April 2015
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 27

B. Kehadiran Anggota

- Anggota, dengan perincian sebagai berikut:
- 90 orang anggota.
- 73 orang anggota.
- 60 orang anggota.
- 48 orang anggota.
- 47 orang anggota.
- 40 orang anggota.
- 39 orang anggota.
- 36 orang anggota.
- 16 orang anggota.
- dengan mengucap
- Bismillaahirrahmaanirrahiim perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka
- Rapat Paripurna DPR RI yang ke27 Masa Persidangan III Tahun Sidang 20142015,
- hari Jumat, 24 April 2015, dan kami nyatakan terbuka untuk umum.
- 1. Fraksi PDI Perjuangan : 55 dari 1i
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya 55 dari i
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 50 dari
- 4. Fraksi Partai Demokrat 45 dari *
- 5. Fraksi Partai Amanat Nasional 25 dari
- 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 32 dari •
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 22 dari
- 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 14 dari
- 9. Fraksi Partai Nasional Demokrat 21 dari
- 10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 14 dari

C. Agenda Rapat

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang

2. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-201

D. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang

F-PG Dr H M AZIS SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH

ISI UCAPAN

- Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir mini yang dibacakan oleh anggota DPR RI yang terhormat Saudari Erma Suryani Ranik, S. H. Nomor anggota A-446 menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat II, dengan catatan untuk memperhatikan batas usia dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penunjukkan Pimpinan KPK sementara .
- Selanjutnya berdasarkan Surat Presiden Nomor R-19/Pres/03/2015, tertanggal 3 Maret 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Badan Musyawarah tanggal 2 April 2015, telah diputuskan bahwa Komisi III DPR RI bertugas untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

KETUA RAPAT

ISI UCAPAN

- H. , M. A. F. , M. H. yang telah menyampaikan laporannya .

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA H LAOLY

ISI UCAPAN

- Kami sampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala dukungan dan partisipasinya semua pihak yang telah mendukung kelancaran pembahasan rancangan undang-undang ini, khususnya para wartawan dan para pemangku kepentingan yang selalu mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang- undang ini dengan tertib .
 - Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lurus dan semoga setiap pemikiran kita yang kita tuangkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa .
2. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-201

F-PAN ANANG HERMANSYAH

ISI UCAPAN

KETUA DPR RI Drs SETYA NOVANTO, Ak

ISI UCAPAN

- Searah dengan upaya penguatan dan peningkatan kinerja Lembaga DPR, DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT sedang menyusun Rencana Strategis DPR RI

2015-2019 dan Peraturan DPR RI tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DPR RI, Berkaitan dengan upaya penguatan dan peningkatan kinerja Lembaga DPR RI ini, Badan Legislasi diharapkan lebih berperan dalam40menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai Peraturan DPR RI, diantaranya mengenai peran diplomasi, reses, dan representasi serta pertanggungjawaban kunjungan kerja dan pengamanan di lingkungan Gedung DPR .

- Selain itu, ada beberapa Panja Pengawasan yang dibentuk oleh komisi dan sedang melaksanakan tugasnya yaitu Panja Pilkada, Panja Dana Desa, Panja Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk 7 provinsi, Panja Keselamatan Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional, Panja Minerba, Panja Migas, Panja Manajemen Penanggulangan Bencana, Panja Anestesi, Panja Penerimaan Negara dan Panja Perbankan .

KETUA RAPAT FADLI ZON, SS, MSc

ISI UCAPAN

- Selaku Pimpinan Rapat kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini .